

Rusmadi



LIBERALISASI AIR

Orkestra Politik-Ekonomi
Sumber Daya Air di Indonesia

Pengantar Khusus

Prof. Dr. Budi Widianarko, M.Sc

Rektor UNIKA Soegijapranata & Guru Besar Toksikologi Lingkungan



LIBERALISASI AIR

Okettra Politik-Ekonomi Sumber Daya Air di Indonesia

Ungkapan Donald Worster dalam *Rivers of Empire*, yang ditulisnya pada tahun 1985 mungkin ada benarnya. Ia mengatakan bahwa air adalah minyak di abad XXI, siapa menguasai air maka ia akan menguasai dunia. Worster sejatinya sedang berbicara soal krisis air: tidak semua tempat bisa mendapatkan air. Itulah sebabnya, mengapa semua orang berebut menguasai air. Bagi pendukung rejim liberal, mekanisme pasar adalah strategi paling jitu untuk menyelesaikan dua persoalan secara sekaligus: krisis air dan mewujudkan keadilan air. Krisis air harus distop dengan tindakan efisiensi dan pembatasan. Sementara keadilan air harus diwujudkan dengan menempatkan persamaan hak (baca: hak atas air/ *water right*) sebagai basis nilai etis untuk bisa berlaku adil.

Tetapi, benarkah persoalannya sesederhana itu? Bagaimana jika mereka yang mampu membayar air kemudian memaksakan haknya dan menyerobot hak orang lain? Adakah jaminan bagi kelompok-kelompok yang lemah secara ekonomi tetap mendapatkan akses terhadap sumber daya air? Lalu, adakah jaminan keadilan air di tengah liberalisasi air? Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini layak direnungkan. Rejim liberal memang begitu kokoh memainkan perannya. Ia tampil dengan pilar-pilar khasnya: penerapan prinsip-prinsip ekonomi (komodifikasi) pada pengelolaan sumber daya air. Liberalisasi air, kemudian melahirkan privatisasi dan komersialisasi air. Air tidak lagi dipahami sebagai barang sosial (*social goods*), melainkan barang ekonomi (*economic goods*). Air, juga tidak lagi dianggap sebagai barang milik publik (*public goods*), melainkan barang milik privat (*private goods*).

Buku ini menyajikan orkestra pergulatan politik-ekonomi atas sumber daya air di Indonesia. Secara tegas, buku ini mematahkan asumsi-asumsi rejim liberal tentang persamaan hak dengan mengajukan argumen bahwa hak saja tidaklah cukup. Nyatanya, pemilik hak tidak secara otomatis memiliki akses terhadap sumber daya air. Dengan begitu, hak atas air harus dilengkapi dengan kemampuan mengakses (*access ability*) sumber daya itu. Di sinilah *power* atau kemampuan si pemilik hak, berupa seperangkat kekuasaan (*bundle of power*) untuk mengambil manfaat dari suatu sumber daya menjadi penting dipertimbangkan di dalam manajemen alokasi daya air. Jelas, bahwa *access* dan *power*, adalah prasyarat bagi tegaknya keadilan air.



☎ 024.70.50.11.15 – 081.931.90.55.80
f facebook/katazamprinting
@katazamprinting
✉ katazamcreative@gmail.com
P www.katazam.blogspot.com
P PJJN 745659A3



Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kemendagri RI
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Telp. 021 3853449 Fax. 021 34833981



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL — i

MOTTO — v

PERSEMBAHAN — vii

SEKAPUR SIRIH PENULIS — ix

KATA PENGANTAR — xv

DAFTAR ISI — xix

BAGIAN I: PENDAHULUAN

- A. Problem Hak dan Akses Terhadap Air — 3
- B. Liberalisasi dan Privatisasi Sumber Daya Air
dan Problem Keadilan — 12
- C. Peta Jalan Liberalisasi Sumber Daya Air di Indonesia — 16

BAGIAN II: LIBERALISASI DAN PRIVATISASI: POLITIK- EKONOMI MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR

- A. *Water Governance* sebagai *New Public Management* — 25
- B. Pergeseran Nilai Air dari Barang Publik ke Barang
Privat — 39

- C. Liberalisasi dan Privatisasi: Politik-Ekonomi Sumber Daya Air — 45
- D. Pandangan Islam terhadap Liberalisasi dan Privatisasi Sumber Daya Air — 57

BAGIAN III: FILSAFAT Keadilan dan Teoritisasi Keadilan Air

- A. Tuntutan Berlaku Adil sebagai "Universalisme" Etis — 67
 - 1. Keadilan Utilitarian — 69
 - 2. Keadilan Libertarian — 77
 - 3. Pandangan Komunitarian — 84
- B. Teoritisasi Keadilan Air: antara Hak dan Akses — 93

BAGIAN IV: DINAMIKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR; BELAJAR DARI KANAL TARUM BARAT

- A. Manajemen Waduk Jatiluhur — 115
 - 1. Keberadaan Waduk Jatiluhur — 115
 - 2. Perubahan-Perubahan Manajemen Jatiluhur — 123
 - 3. Pengaruhnya pada Trend Alokasi Air di Kanal Tarum Barat — 144
- B. Model *Water Governance* pada Alokasi Air di Kanal Tarum Barat — 149
 - 1. Alokasi Air di Kanal Tarum Barat dan Prosedur-Prosedurnya — 149
 - 2. Bundle of Power dalam *Water Governance* pada Alokasi Air di Kanal Tarum Barat — 161

BAGIAN V: MEMBANGUN Keadilan Air: MELAWAN LIBERALISASI

- A. Politisasi Air dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia — 169
 - 1. Politik Nilai Ekonomi Air (Komodifikasi Air) — 169

- 2. Politik Kebijakan Alokasi Air — 178
- 3. Politik Ruang dan Tata Guna Lahan — 179
- B. Analisis Keadilan Air dalam *Water Governance* pada Alokasi Air di Kanal Tarum Barat — 181
 - 1. Keadilan Air dalam Kebijakan Alokasi Air — 181
 - 2. Keadilan Air dalam Kemampuan Akses terhadap Alokasi Air — 188
- C. Membangun Keadilan Air: Melawan Liberalisasi — 196

BAGIAN VI: PENUTUP

- A. Kesimpulan — 207
- B. Penutup — 211